

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN TAHUN 2020



**HARI JADI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
2 DESEMBER 1950**

Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat : Jalan Melati Nomor 14 Kandangan 71211, Telpon/Fax (0517) 21094

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2020 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun kedua setelah ditetapkannya Bupati terpilih periode tahun 2018-2023. Program dan kegiatan pada RENJA 2020 ini mengacu pada RPJMD 2018-2023 dan RENSTRA 2018-2023 dengan tetap mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Anggaran 2020. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja SKPD tahun 2020 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Kandangan, 10 Juli 2019



Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ir. H. SAIDINOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 19641215 199312 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2017.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Perikanan 2019-2023	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	13
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BA III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	27
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan	28
3.3. Program dan Kegiatan.....	28
BAB IV PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan).....	6
Tabel 2.2	Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2019-2023	14
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	15
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	21
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
Tabel 3.1	Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2020	27

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Perikanan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Renja SKPD merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Mengingat arti strategis Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Perikanan Tahun 2020 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten;

4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Dinas Perikanan Tahun 2020 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Dinas Perikanan Tahun 2020 ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perikanan tahun 2020 dan menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka sistematika penyusunan Renja Dinas Perikanan Tahun 2020 meliputi:

- BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD, serta Program dan Kegiatan.
- BAB IV PENUTUP

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN
TAHUN 2018**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan 2019 – 2023.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kerja Dinas Perikanan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nama SKPD : Dinas Perikanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2019	
									Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		0	0		NON URUSAN									
3	01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	80	81	86,57	106,88	82	82	82
3	01	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai perangko	-	1,936	310 lembar 50 lembar	2.296 lembar	100	-	-	-
3	01	01	01	01	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun					1 tahun	1 tahun	100
3	01	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	jumlah rekening	-	16 rekening	4 rekening	4 rekening	100	4 rekening	-	-
3	01	01	01	02		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun					1 tahun	1 tahun	100
3	01	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kondisi kendaraan dinas/mobil laik pakai	-	99 Unit	22 Unit	22 Unit	100	22 Unit	121 Unit	100
3	01	01	01	07	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Jumlah kegiatan pameran dan pawai pembangunan	-	8 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	-	-	-
3	01	01	01	04		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun					1 tahun	1 tahun	100
3	01	01	01	09	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan gedung/kantor dengan kondisi baik	-	131 unit	25 unit	25 unit	100	-	-	-

3	01	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan dalam 1 tahun	-	124 jenis	31 jenis	31 jenis	100	-	-	-
3	01	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	-	16 jenis	4 jenis	4 jenis	100	-	-	-
3	01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik kantor	-	28 jenis	7 jenis	7 jenis	100	-	-	-
3	01	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	-	25 paket	2 paket	2 paket	100	-	-	-
3	01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah	-	12 SKH	3 SKH	3 SKH	100	-	-	-
3	01	01	01	17	Penyediaan makan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat, tausyiah dan tamu	-	13 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	-	-	-
3	01	01	01	06		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun					1 tahun	1 tahun	100
3	01	01	01	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	-	4 tahun	1 tahun	1 tahun	100	-	-	-
3	01	01	01	19	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	-	60 orang	6 orang	6 orang	100	-	-	-
3	01	01	01	07		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun					1 tahun	1 tahun	100
3	01	01	01	20	Rapat rapat konsultasi dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten	5 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	5 tahun	100
3	01	01	01	09	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun					1 tahun	1 tahun	100
3	01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	80	81	86,57	106,88	82	82	82

3	01	01	02	22	Pemeliharaan berkala Gedung kantor	Jumlah gedung/kantor dengan kondisi baik	-	13 unit	2 unit	2 unit	100	-	-	-
3	01	01	02	14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	13 Jenis					13 Jenis	13 Jenis	100
3	01	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kondisi mobil/speedboat operasional laik jalan	-	32 unit	2 unit	2 unit	100	-	-	-
3	01	01	02	24		Jumlah kendaraan dinas/operasional kondisi baik	28 Unit					28 Unit	28 Unit	100
3	01	01	02	31	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah gedung/kantor dengan kondisi baik	2 buah					2 buah	2 buah	100
3	01	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	AKIP	-	BB	BB	BB	100	BB	-	-
3	01	01	07		Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai/Predikat AKIP	A					A	A	100
3	01	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	-	108 laporan	6 laporan	6 laporan	100			
3	01	01	07	07	Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	100
3	01	01	07	08	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 dokumen					15 dokumen	15 dokumen	100

3	01	01			PILIHAN									
3	01	01			Kelautan dan Perikanan									
3	01	01	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Poduksi perikanan budidaya	-	4,106.2 Ton	4,355 Ton	4,572.79 Ton	105	-	-	-
3	01	01	03		Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Poduksi perikanan budidaya	4.791 Ton					4.791	4.791	100
3	01	01	03	01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah benih ikan yang tersedia	650.000 benih	3,570,700 benih	607, 500 benih	607,860 benih	100,06	650,000 benih	650.000 benih	100
3	01	01	20	03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah luasan media budidaya	-	0.14	0.0864	0.0864	100			
3	01	01	20	06	Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah benih yang ditebar	-	-	230.000	230.000	100		-	-
3	01	01	03	02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	Jumlah luasan budidaya	0.12 Ha					0.12	0.12	100
3	01	01	03	03	Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah benih yang ditebar	230.000 ekor					230.000	230.000	100
3	01	01	03	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan	3 sampel					3 sampel	3 sampel	100
3	01	01	03	05	Pelatihan Budidaya Perikanan	Jumlah petani ikan yang memiliki kompetensi	90 orang					90 orang	90 orang	100
3	01	01	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	-	8,490.04 Ton	8,708 Ton	9,056.43 Ton	104	8,708 Ton	8,708 Ton	100
3	01	01	04		Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	9.579 Ton					9.579 Ton	9.579 Ton	100
3	01	01	21	01	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan yang memiliki alat tangkap yang representatif	-	8.9 %	8,9 %	8,9 %	100	-	-	-

3	01	01	21	08	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kelestarian Sumberdaya Perikanan	Persentase pengawasan terhadap daerah yang dijadikan potensi perikanan tangkap	-	100	100	100	100	-	-	-
3	01	01	04	02	Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan yang mengikuti sosialisasi	150 orang					150 orang	150 orang	100
3	01	01	04	04	Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Illegal Fishing yang ditindaklanjuti	100 %					100	100	100
3	01	01	04	501	Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah alat tangkap yang representatif	600 unit					600 unit	600 unit	100
3	01	01	10		Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan	82					82	82	100
3	01	01	10	33	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan Perangkat Daerah sesuai Standar	1 tahun					1 tahun	1 tahun	100
3	01	01	23		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase jumlah pelaku usaha yang aktif	-	10 %	15 %	15 %	100	-	-	-
3	01	01	101		Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif	3 %					3 %	3 %	100
3	01	01	23	01	Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha yang menggunakan teknologi hasil perikanan	-	85 orang	4 orang	4 orang	100	-	-	-
3	01	01	23	03	Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang aktif	-	120 orang	12 orang	12 orang	100	-	-	-

3	01	01	101	01	Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha yang menggunakan teknologi hasil perikanan	9 orang					9 orang	9 orang	100
3	01	01	101	02	Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	Jumlah event dan promosi perikanan yang dilaksanakan	1 kali					1 kali	1 kali	100
3	01	01	101	03	Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Sarana Pemasaran Hasil Perikanan yang tersedia	2 unit					2 unit	2 unit	100
3	01	01	03		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	1 %					1 %	1 %	100
3	01	01	03	01	Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan Pelaku Agribisnis Perikanan	Jumlah petani ikan/nelayan/pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan	70 orang					70 orang	70 orang	100

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2019 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah:
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:
 - Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
 - Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
 - Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan
 - 2) Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu:
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Keuangan
 - Penyusunan Dokumen AKIP
 - 4) Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah dengan kegiatan :
 - Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah
 - 5) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dengan kegiatan:
 - Pengembangan Bibit Ikan Unggul
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
 - Budidaya Ikan Air Tawar
 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - Pelatihan Budidaya Perikanan

- 6) Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dengan kegiatan:
 - Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
 - Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap

- 7) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan kegiatan:
 - Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
 - Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan
 - Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan

- 8) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan
 - Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan Pelaku Agribisnis Perikanan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Hubungan antara tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2018)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)
								2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	23,50	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	20,67	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
		Nilai/Predikat AKIP	A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	80,55 (A)	81,89 (A)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)
2	Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	9,07 %	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	%	3,73	5,46	6,56	8,64	8,9	9,07	9,07

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perikanan sesuai dengan Renstra Dinas Perikanan tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perikanan

No	Indikator	Target Renstra			Realisasi Capaian	Proyeksi	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	20,67	23,50	23,50	20,67	23,50	23,50
	Nilai/predikat AKIP	BB	A	A	A	A	A
2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	3,73	5,46	6,56	3,73	5,46	6,56

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Tingkat Pelayanan Dinas Perikanan

Pembentukan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tugasnya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Dinas Perikanan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. menetapkan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menetapkan program kerja Dinas Perikanan sesuai dengan kebijakan teknis dinas;
3. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Perikanan Budidaya;
4. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Perikanan Tangkap;

5. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan;
6. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan budidaya;
3. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan tangkap;
4. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pengolahan dan pemasaran perikanan;
5. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan UPTD;
6. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, Sasaran Strategis Dinas Perikanan terdapat 2 (dua) yakni :

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
2. Meningkatnya persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Secara struktur organisasi, saat ini Dinas Perikanan telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan. Keberadaan Sekretariat dan tiga bidang (Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan) telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi dinas.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- 1) Permintaan produk perikanan yang masih terbuka luas dan terus meningkat,
- 2) Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja belum optimal.

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 – 2023, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

Visi: “Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”

Misi:

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

- 1). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meliputi :
 - a. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan
 - b. Meningkatnya kualitas pendidikan
 - c. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
 - d. Meningkatnya kualitas kesehatan
 - e. Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman
 - f. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - g. Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat
 - h. Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat

2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

- 1). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan, meliputi:
 - a. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah
 - b. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
 - c. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- d. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
- e. Meningkatnya investasi PMDN
- f. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

- 1). Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian, meliputi :
 - a. Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas
 - b. Meningkatnya sarana prasarana sosial yang berkualitas

4. Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

- 1). Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan, meliputi :
 - a. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat
 - b. Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak
 - c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - d. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis

5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

- 1). Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi, meliputi :

- a. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik
- b. Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi
- c. Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah
- d. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

Sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, maka Dinas Perikanan akan mendukung pelaksanaan misi sebagai bentuk tanggungjawab pendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan terutama pada Misi ke-2 yakni pada “Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan”.

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1. Tantangan

- 1). Permintaan produk perikanan yang masih terbuka luas dan terus meningkat;
- 2). Masih kurangnya pemanfaatan lahan yang berpotensi untuk pengembangan perikanan budidaya karena kurangnya pengetahuan tentang cara budidaya ikan yang baik terutama untuk ikan-ikan lokal.
- 3). Tingkat kesadaran nelayan pengguna alat tangkap yang ramah lingkungan relatif rendah;
- 4). Rendahnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

2. Peluang

- 1) Tersedianya potensi sumberdaya alam yang mendukung pengembangan perikanan tangkap dan budidaya,
- 2) Kebijakan pemerintah dalam mendukung pengadaan sarana dan prasarana pembudidayaan usaha kecil masyarakat perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2020, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
0.0.7	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP; Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen Keuangan Daerah	82,55 Nilai; 100 %	9,750,000	0.0.7	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP; Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen Keuangan Daerah	82,55 Nilai; 100 %	9,749,600
0.0.7.7	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 dokumen keuangan	4,875,000	0.0.7.7	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 dokumen keuangan	4,874,800
0.0.7.8	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	15 dokumen AKIP	4,875,000	0.0.7.8	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	15 dokumen AKIP	4,874,800
0.0.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Tingkat Kepuasan Pelayanan	100	582,533,000	0.0.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Tingkat Kepuasan Pelayanan	100	578,337,690
0.0.1.1	Penyediaan Jasa dan administrasi kantor	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	39,680,350	0.0.1.1	Penyediaan Jasa dan administrasi kantor	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	39,163,500
0.0.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	32,820,000	0.0.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	32,820,000
0.0.1.4	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	14,000,000	0.0.1.4	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	14,000,000
0.0.1.6	Penyediaan makan dan minum	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	24,975,000	0.0.1.6	Penyediaan makan dan minum	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	24,975,000
0.0.1.7	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	160,450,000	0.0.1.7	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	156,750,000
0.0.1.8	Rapat rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	310,607,650	0.0.1.8	Rapat rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	310,629,190
0.0.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD	Tingkat Kepuasan Pelayanan	100	278,376,745	0.0.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD	Tingkat Kepuasan Pelayanan	100	205,369,000
0.0.2.14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	1 tahun	82,520,745	0.0.2.14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	1 tahun	94,969,000

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
0.0.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	1 tahun	95.856,000	0.0.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	1 tahun	97,400,000
0.0.2.31	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	1 tahun	103,400,000	0.0.2.31	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	1 tahun	13,000,000
0.0.10	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	Tingkat Kepuasan Pelayanan	100	88.084.100	0.0.10	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Tingkat Kepuasan Pelayanan	100	22,157,750
0.0.10.33	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	Pelayanan perangkat daerah sesuai standar	1 tahun	88.084.100	0.0.10.33	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	Pelayanan perangkat daerah sesuai standar	1 tahun	0
						0.0.10.49	Promosi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten	Jumlah promosi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang dilaksanakan	2 kali	22,157,750
27.1	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif	5 %	27,900,000	27.1	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif	5 %	24,880,000
27.1.1	Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Kabupaten	Jumlah pelaku usaha yang menggunakan teknologi hasil perikanan	10 orang	8,250,000	27.1.1	Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Kabupaten	Jumlah pelaku usaha yang menggunakan teknologi hasil perikanan	10 orang	0
27.1.2	Pemasaran dan Invstasi Hasil Perikanan	Kabupaten	Jumlah event promosi perikanan yang dilaksanakan	1 kali	7,750,000	27.1.2	Pemasaran dan Invstasi Hasil Perikanan	Kabupaten	Jumlah event promosi perikanan yang dilaksanakan	1 kali	0
27.1.3	Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten	Jumlah sarana pemasaran hasil perikanan yang tersedia	2 unit	11,900,000	27.1.3	Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten	Jumlah sarana pemasaran hasil perikanan yang tersedia	2 unit	0
						27.1.5	Bimbingan Teknis Pengolahan Albumin	Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang	Jumlah pelaku usaha pengolahan yang memiliki kompetensi	30 orang	24,880,000
27.2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	Kabupaten	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	7%	16,551,600	27.2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	Kabupaten	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	7%	50,000,000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
27.2.1	Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan pelaku agribisnis perikanan	Kabupaten	Jumlah petani ikan/nelayan/pelaku agribisnis yang memiliki kompetensi	75 orang	16,551,600	27.2.1	Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan pelaku agribisnis perikanan	Kabupaten	Jumlah petani ikan/nelayan/pelaku agribisnis yang memiliki kompetensi	75 orang	0
						27.2.2	Pendampingan Asuransi Nelayan	Daha Barat, Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang, Kandangan	Jumlah nelayan yang mendapat pendampingan	500 orang	50,000,000
27.3	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Kabupaten	Poduksi perikanan budidaya	5,270 Ton	775.780.000	27.3	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Kabupaten	Poduksi perikanan budidaya	5.270 Ton	612,130,000
27.3.1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Kabupaten	Jumlah bibit ikan	715.000 ekor	103,150,000	27.3.1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Kabupaten	Jumlah bibit ikan	715.000 ekor	0
27.3.2	Pengembangan Perikanan Sarana dan prasarana budidaya perikanan	Kabupaten	Jumlah luasan media budidaya	0,144 Ha	178,295,000	27.3.2	Pengembangan Perikanan Sarana dan prasarana budidaya perikanan	Daha Barat, Sungai Raya, Simpung	Jumlah luasan media budidaya	0,144 Ha	0
27.3.3	Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar	Kabupaten	Jumlah benih ikan yang ditebar	230.000 ekor	335,200,000	27.3.3	Budidaya Ikan Air Tawar	Angkinang, Daha Barat, Daha Utara, Loksado, Kandangan, Sungai Raya, Simpung, Telaga Langsat	Jumlah benih ikan yang ditebar	230,000 ekor	0
27.3.3	Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)	Kabupaten	Jumlah benih ikan yang ditebar	10.000 ekor	118,650,000	27.3.3	Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)	Kabupaten	Jumlah benih ikan yang ditebar	10.000 ekor	0
27.3.4	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	SKPD	Jumlah pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan	3 sampel	26.225.000	27.3.4	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	SKPD	Jumlah pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan	3 sampel	0
27.3.5	Pelatihan Budidaya Perikanan	Kabupaten	Jumlah pelatihan budidaya perikanan	4 kali	36.130.000	27.3.5	Pelatihan Budidaya Perikanan	Kabupaten	Jumlah pelatihan budidaya perikanan	4 kali	0
						27.3.8	Pengembangan Bibit Ikan	Padang Batung	Jumlah bibit ikan	715.000 ekor	105,540,000
						27.3.9	Budidaya Ikan Kolam Terpal	Daha Barat, Simpung	Jumlah pembudidaya ikan yang memiliki kompetensi kolam	16 orang	206,075,000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
						2	Budidaya Ikan Keramba	Daha Barat, Sungai Raya	Jumlah pembudidaya ikan yang memiliki kompetensi karamba	60 orang	300,515,000
27.4	Program Peningkatan produksi perikanan tangkap		Produksi perikanan tangkap	10.058 Ton	1,605,369,000	27.4	Program Peningkatan produksi perikanan tangkap		Produksi perikanan tangkap	10.058 Ton	338,689,900
27.4.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	Kabupaten, Sungai Raya	Jumlah alat tangkap yang representatif Jumlah kapal yang representatif	600 unit 15 unit	324,950,000	27.4.1	Penyediaan Sarana dan prasarana nelayan perikanan tangkap	Daha Utara, Daha Barat	Jumlah alat tangkap yang representatif Jumlah kapal yang representatif	600 unit 15 unit	0
27.4.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap (DAK)		Jumlah kapal yang representatif	55 unit	986,975,000		Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap		(DAK) Jumlah kapal yang representatif	55 unit	0
27.4.2	Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Kabupaten	Jumlah nelayan yang mengikuti sosialisasi	150 orang	19,854,000		Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Kabupaten	Jumlah nelayan yang mengikuti sosialisasi	150 orang	0
27.4.4	Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	Kabupaten, Kalumpang, Kandangan, Daha Barat, Daha Selatan, Daha Utara	Persentase jumlah kasus pelanggaran illegal fishing yang ditindaklanjuti	100%	273,590,000	27.4.4	Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	Kabupaten, Kalumpang, Kandangan, Daha Barat, Daha Selatan, Daha Utara	Persentase jumlah kasus pelanggaran illegal fishing yang ditindaklanjuti	100%	338,689,900
			Total		3.384.344.445				Total		1.841.313.940

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Forum SKPD merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Kegiatan Musrenbang Kecamatan dengan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) yang diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah Forum SKPD. Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial.

Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dengan Draf Rencana Kerja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor.

Dinas Perikanan telah melaksanakan acara forum SKPD untuk menghimpun dan mensinergikan usulan-usulan kegiatan, baik yang berasal dari Bottom up maupun Top down. Setelah dilakukan analisis kesesuaian usulan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan semuanya memiliki kesamaan, sehingga semua usulan tersebut tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020 karena lebih memprioritaskan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2020 di bidang perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Volume
1	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap - Penyediaan sarana dan prasarana nelayan perikanan tangkap	- Perahu bermotor - Alat tangkap	Murung Raya Kec. Daha Utara Pasungkan Kec. Daha Utara Pakan Dalam Kec. Daha Utara Tanjung Selor Kec. Daha Barat	5 unit 5 unit 5 unit 600 unit
2	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya - Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan - Budidaya Ikan Air Tawar	- Rehab kolam ikan - Karamba - Net tancap (hapa) - Kolam terpal - Bibit dan pakan ikan	Tanah Bangkang Kec. Sungai Raya Badaun Daha Barat Simpur Kec. Simpur Wasah Hulu Kec. Simpur Tawia Kec. Angkinang Badaun Kec. Daha Barat Pasungkan Kec. Daha Utara Tumingki Kec. Loksado Gambah Luar Kec. Kandangan Asam Kec. Sungai Raya Desa Simpur Kec. Simpur Desa Wasah Hulu Kec. Simpur Hamak Timur Kec. Telaga Langsung	1 paket 1 paket 25 buah 15 buah 230.000 ekor 6.700 kg

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2017 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam RKP Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan dengan revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan yang berkualitas, dan pembangunan perumahan dan permukiman.

2. Pembangunan Sektor Unggulan

Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan kedaulatan pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan terutama dengan pembangunan konektivitas laut dan industri maritim, pengembangan kawasan pariwisata dan percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi (KEK).

3. Pemerataan dan Kewilayahan

Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, pengembangan ekonomi produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan sosial yang komprehensif, pembangunan

daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, reforma agraria.

4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan

Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan diarahkan untuk konsolidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan penegakan hukum, reformasi birokrasi.

5. Pembangunan Ekonomi

Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kerja Dinas Perikanan

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Tahun 2018-2023, yaitu:

a. Tujuan

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB.

b. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
2. Meningkatnya persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB

3.3 Program dan Kegiatan Renja Kerja Dinas Perikanan

Program dan kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2020 direncanakan berjumlah 8 Program dan 18 kegiatan dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 1.841.313.940.

Tabel 3.1. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2020

No	Program	Pagu Indikatif
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	578.337.690
	1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	39.163.500
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.820.000
	3. Penyebarluasan informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	14.000.000
	4. Penyediaan makanan dan minuman	24.975.000
	5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	156.750.000
	6. Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	310.629.190
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	205.369.000
	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	94.969.000
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	97.400.000
	3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	13.000.000
3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.749.600
	1. Penyusunan Dokumen Keuangan	4.874.800
	2. Penyusunan Dokumen AKIP	4.874.800
4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	22.157.750
	1. Promosi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	22.157.750
5	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	24.880.000
	1. Bimibingan Teknis Pengolahan Albumin	24.880.000
6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	50.000.000
	1. Pendampingan Asuransi Nelayan	50.000.000
7	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	612.130.000
	1. Pengembangan Bibit Ikan	105.540.000
	2. Budidaya Ikan Kolam Terpal	206.075.000
	3. Budidaya Ikan Keramba	300.515.000
8	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	338.689.900
	1. Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	338.689.900
	Jumlah	1.841.313.940

BAB IV. PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang - undang Nomor 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Perikanan Tahun 2020 selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020;
2. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang perikanan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing- masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahun 2020;
3. Renja Dinas Perikanan Tahun 2020 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2020 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tahun 2020.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Perikanan Tahun 2020 ini akan dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam renja ini.

Kandangan, 10 Juli 2019

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



I. H. SAIDINOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 19641215 199312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PERIKANAN

Jalan Melati No : 14 Kandangan
Telp. (0517) 21094 Fax. (0517) 21094

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguann Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020**
- PERTAMA** : Renja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Perikanan sebagaimana terdapat dalam Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Renja Dinas Perikanan sebagaimana dalam diktum Pertama berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perikanan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 10 Juli 2019



Kepala Dinas,

Ir. H. SAIDINOOR
Pembina Utama Muda

NIP.19641215 199312 1 002

